

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil dan penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan yaitu:

- a. Upaya meningkatkan pelayanan pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DPPO) dilakukan melalui upaya peningkatan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam bidang pendidikan seperti membangun ruang perpustakaan, ruang kelas baru, rehab kelas, ruang laboratorium dan mebel untuk ruang kelas baru.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan yaitu:
 - 1) Kurangnya pengalokasian DAK oleh Pemerintah Pusat untuk pendidikan di Kabupaten Lembata.
 - 2) Keadaan topografi dan sarana prasarana yang terbatas sehingga pemerintah sulit untuk menjangkau sekolah-sekolah yang jauh bahkan sekolah-sekolah yang berada di pelosok Kabupaten Lembata.
 - 3) Kurangnya ketersediaan DAK di bidang pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia.

4) Berkaitan dengan kelembagaan yaitu kurangnya koordinasi antara DPPO Kabupaten Lembata dengan UPTD PPO Kecamatan Nubatukan dalam menangani DAK di bidang pendidikan.

c. Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh DPPO maupun UPTD PPO dalam upaya meningkatkan pelayanan Pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata yaitu:

- 1) Meningkatkan dana DAK di bidang pendidikan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada setiap daerah khususnya Kabupaten Lembata.
- 2) Meningkatkan dana pendidikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.
- 3) Meningkatkan transportasi dan pembangunan jalan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lembata agar DPPO dapat lebih mudah menjangkau sekolah-sekolah yang kondisi topografinya susah untuk dijangkau.
- 4) Meningkatkan koordinasi antara DPPO dengan UPTD PPO baik berkaitan dengan perencanaan, pengalokasian dana DAK, dan pengawasan saat pelaksanaan DAK ke setiap sekolah yang ada di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata.

2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian serta analisis yang ada, peneliti memberikan saran yang dapat dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan SMA berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus di Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, antara lain:

- a. Kinerja dari Pemerintah Kabupaten Lembata dalam hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DPPO) lebih ditingkatkan lagi dalam mengelola dana DAK yang dialokasikan ke setiap sekolah-sekolah yang ada di setiap kecamatan khususnya Kecamatan Nubatukan sehingga tidak ada kendala yang mana DAK untuk di tahun 2016 tidak diperoleh untuk membiayai pendidikan di Kabupaten Lembata.
- b. Pemerintah Kabupaten Lembata dalam hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DPPO) untuk lebih intensif melakukan koordinasi dengan UPTD PPO Kecamatan Nubatukan maupun kecamatan lainnya dalam hal pelaksanaan DAK di bidang pendidikan ke setiap sekolah-sekolah SMA yang ada di Kecamatan Nubatukan maupun kecamatan lainnya.
- c. Berkaitan dengan permasalahan pangakat yang ada di UPTD PPO Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, diharapkan pemerintah pusat untuk membentuk suatu aturan yang lebih memperjelas kewenangan dan fungsi dari UPTD PPO.
- d. Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan ke setiap daerah lebih banyak membiayai pendidikan secara fisik saja yaitu berkaitan dengan sarana prasana untuk menunjang sekolah agar lebih baik. Sekolah-sekolah

yang ada di Kecamatan Nubatukan masih membutuhkan sarana prasarana penunjang proses belajar mengajar, tetapi juga membutuhkan kemampuan dari setiap guru yang mengajar, agar prestasi sekolah (dalam hal ini berkaitan dengan tingkat kelulusan dan prestasi lomba secara akademik) lebih meningkat. DAK di bidang pendidikan digunakan juga untuk membiayai pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh guru-guru SMA, agar dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut, akan meningkatkan kemampuan setiap guru-guru untuk mendidik anak muridnya menjadi anak-anak yang lebih berintelektual tinggi. Sehingga, anak-anak tersebut dapat membangun daerahnya sendiri yaitu Kabupaten Lembata agar terhindar dari kemiskinan baik dalam kemiskinan ekonomi maupun kemiskinan pendidikan.

- e. Bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dalam upaya meningkatkan pendidikan di harapkan adanya transparansi dalam mengelolah keuangan di bidang pendidikan agar tidak ada indikasi korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Nurmandi, 2010, *Manajemen Pelayanan Publik*, Cetakan I, PT. Sinergi Visi Utama, Yogyakarta.

Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, 1991, *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Akmal Boedianto, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, Cetakan I, LasBang PresSindo, Yogyakarta.

Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cetakan VII, Nusa Media, Bandung.

Jimly Asshiddiqie, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Negara*, Cetakan IV, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Ni'Matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.

, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Riawan Tjandra. W, 2013, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, PT Grasindo, Jakarta.

Sirajuddin, Didik Sukrino dan Winardi, 2011, *Hukum Pelayanan Publik*, cetakan I, Setara Press, Malang.

Tim Redaksi Gramedia Pustaka Utama, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat*, PT Gramedia, Jakarta.

Jurnal:

Anik widiastuti, 2012, "Kompetensi Mengajar Guru IPS di Kabupaten Sleman", Jurnal Nuansa, Vol.1 No.1 ed. Maret-Agustus 2012, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Al-Amin Dompu.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23. Jakarta.

Website:

Pemerintah Kabupaten Lembata, sejarah berdirinya Kabupaten Lembata <http://www.lembatakab.go.id/index.php/profil/sejarah>, diunggah Sabtu 05 Maret 2016 ; pkl. 10:38.

Mengurai Kebijakan DAK Bidang Pendidikan, <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn>, diunggah Minggu 6 Maret 2016; pkl.13:54.

Hindari Korupsi DAK Tahun 2014, <http://www.mediantt.com>, diunggah Minggu 6 Maret 2016; pkl.19:15.

Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota, <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/180~PMK.07~2013Perlampa.pdf>, diunggah Minggu 6 Maret 2016; pkl: 19:15.

Laporan Persiapan Penelitian-Bappeda NTT, <file:///C:/Users/Windows%208/Downloads/>

baseline survey komoditas unggulan ntt 2013 part7.pdf, diunggah Minggu 6 Maret 2016; pkl.19:20.

Pengertian Pendidikan <http://www.kajianteor.com/2013/03/definisi-pendidikan-pengertian-pendidikan-oleh-ahli.html>, diunggah 14 Maret 2016; pkl. 9:57

Pengertian Pelayanan, <http://eprints.uny.ac.id/8586/3/BAB%20%20-%2005402244038.pdf>, diunggah Senin 4 April 2016; pkl. 22:29





PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 2 NUBATUKAN
JL. TRANS ATADEI – LUSIKAWAK – LEWOLEBA
Email : sman2.nubatukan@gmail.com



SURAT KETERANGAN
NOMOR : 182 /422.1/SMAN.2/ VIII /2016

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SINU YOHANES, S.Pd
NIP : 19610525 199802 1 002
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : SMA Negeri 2 Nubatukan

Dengan ini menerangkan:

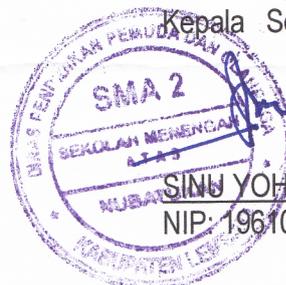
Nama : Lidya Paskalia Hana
Nomor Mahasiswa : 120511087
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
Universitas ATMAJAYA Yogyakarta
Lokasi Riset : Lembata
Judul skripsi : Upaya Meningkatkan Pelayanan Pendidikan SMA berkaitan dengan
dana alokasi khusus di kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata

telah selesai melakukan Riset pada SMA Negeri 2 Nubatukan, selama 2 (dua) minggu terhitung 04 April 2016 sampai dengan 18 April 2016.

Demikian Surat Keterangan ini, diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : LEWOLEBA
Pada tanggal : 23 Agustus 2016

Kepala Sekolah,



SINU YOHANES, S.Pd
NIP: 19610525 199802 1 002



YAYASAN DON BOSCO PERWAKILAN LEMBATA
SMAS FRATER DON BOSCO LEWOLEBA. AKREDITASI - A
Jl. Trans Lembata Kec. Nubatukan, Kab. Lembata - Propinsi NTT
Tlp. 0383-2343465, Fax : 2343467



NSS : 302241405002 email : smaterdbl@rocketmail.com NPSN : 50309120

SURAT KETERANGAN

Nomor : 163 /SMAS-DB/HM/IX/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fr. Nisensius Mety, S. Pd., CMM

Jabatan : Kepala Sekolah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Lidya Paskalia Hana

Nim : 1223733550

Program Studi : Ilmu Hukum

Asal Instansi/Lembaga : Atma Jaya Yogyakarta

Telah melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan di sekolah SMAS Frater Don Bosco Lewoleba.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lewoleba

Pada tanggal : 12 September 2016

Kepala Sekolah



Fr. Nisensius Mety, S. Pd., CMM

Tembusan :

1. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Trans Lembata No. Telp / Fax. (0383) 41395 - Lewoleba

Lewoleba, 29 April 2016

Nomor : Kesbangpol.070 / 72.a / 2016
Lampiran : ~
Perihal : **Rekomendasi Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala UPTD PPO
di-
Tempat

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor. 074/1437/Kesbangpol / 2016, tanggal 27 April 2016, Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini diberikan Surat Keterangan / Rekomendasi kepada :

Nama : Lidya Paskalia Hana
NIM : 120511087
Kebangsaan : Indonesia

Akan melaksanakan Penelitian dengan judul ;

“ UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN SMA BERKAITAN DENGAN DANA ALOKASI KHUSUS DI KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA.”

Lokasi Penelitian : UPTD PPO Kecamatan Nubatukan Kab. Lembata

Waktu Kegiatan : 2 (Dua) Minggu

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati / mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat, dan melaporkan hasil Penelitian setelah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian kepada Bupati Lembata, cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lembata.

a.n. Kepala Badan Kesbangpol,
Kabid Politik,

Natalisia R. Buyanaya, S.Sos

M B A Pembina

NIP.19701223 200012 2 004

Tembusan :

1. Bupati Lembata di Lewoleba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lembata di Lewoleba;
3. Camat Nubatukan di Lewoleba;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lembata di Lewoleba;
5. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
6. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Trans Lembata No. Telp / Fax. (0383) 41395 - Lewoleba

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : Kesbangpol.070/195/2016

Membaca : Surat Kepala UPTD PPO Kec. Nubatukan, Nomor:
371/837/17/IX/PPON/2016

Memperhatikan : Surat Keterangan / Rekomendasi Bupati Lembata Cq. Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lembata, Nomor :
Kesbangpol.070/72.a/2016, Tanggal 29 April 2016, Perihal:
Rekomendasi melakukan penelitian:

Menerangkan : Nama : Lidya Paskalia Hana
NIM : 120511087
Kebangsaan : Indonesia

1. Telah Selesai Melakukan Penelitian UPTD PPO Kec. Nubatukan Kab. Lembata dengan judul penelitian "UPAYA ^{PENDIDIKAN SMA BERKAITAN DENGAN} ~~M~~PENINGKATAN PELAYANAN DANA ALOKASI KHUSUS DI KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA . "
2. Selama melaksanakan penelitian yang bersangkutan senantiasa mentaati segala ketentuan/ peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lewoleba, 19 September 2016

a.n. Kepala Badan Kesbangpol
Kabid Politik,

Natalisia P. Buyanaya, S.Sos
Pembina

NIP.19701223 200012 2 004

Tembusan :

1. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lembata di Lewoleba;
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univ. Atma Jaya Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.